

Hubungan Indonesia-Malaysia: Memerlukan Perspektif dan Kebijakan Baru?

Zainuddin Djafar*

The relationship between Indonesia-Malaysia in 2005 and 2006 is quite problematic concerning three main issues; illegal migrant, illegal logging, and Ambalat's dispute. Historically, there were disputes which broke up the relationship between the two countries in 1963 until 1966. Forty years later (1996-2006), three main issues occurred, which have no correlation with formerly disputes. Those issues have become significant after Indonesia entered multidimensional crisis in 1997-1999 and the effects remain. At the other side, Malaysia has reached rapid growth in economic, business, manufacture, and financial in the last past seven years. These two realities of circumstances have become Indonesia and Malaysia position background, considering their own self as the right one of the three sensitive issues. The reconstruct of a good, close, and maximal neighbourhood between the two countries is really expected. This article observes the needed of consideration from Indonesia on policy aspect and new perspective in facing pressure from Malaysia. It is obvious that those matters are the consequences for the establishment of an advantage relationship between the two countries.

Pendahuluan

Memasuki minggu kedua Januari (12&13) 2006, terjadi pertemuan bilateral tingkat tinggi (yang disebut juga sebagai

* Zainuddin Djafar Ph.D. adalah Ketua Program S2 Kajian Hubungan Internasional, Pasca Sarjana UI dan seorang staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI yang baru saja menyelesaikan Ph.D. di GIPIS, *Department of Politics, University of Reading, United Kingdom* pada bulan Oktober 2004. Selain itu, gelar MA di bidang *International Studies*, diperoleh di universitas yang sama pada tahun 1988, setelah sebelumnya memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari FISIP UI pada tahun 1982. Penelitian yang pernah diikuti adalah sebagai anggota tamu tim peneliti di Daiwa Foundation Japan, PPW LIPI, P3I DPR RI, DEPLU, dan LAPAN.

pertemuan konsultasi tahunan) antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Bukit Tinggi (Sumatera Barat), yang berupaya mencari penyelesaian maupun kata akhir terhadap beberapa masalah utama (isu-isu perbatasan, soal TKI, dan *illegal logging*) yang masih menjadi batu sandungan bagi hubungan kedua negara. Dari beberapa isu yang sudah jelas diketahui mengganjal hubungan bilateral Indonesia-Malaysia tersebut, ternyata pihak Malaysia seolah-olah tidak mau tahu dan menganggap sepi begitu saja.

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri kalau pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Abdullah Ahmad Badawi menghasilkan satu berita yang cukup kontroversial yaitu 'Indonesia menolak tawaran kerja sama Malaysia dalam eksplorasi sumber daya alam di perairan blok Ambalat (kawasan perairan sebelah timur Pulau Kalimantan) yang dikenal kaya kandungan minyak bumi'.¹ Untung tidak semua isu lainnya (*illegal logging*, TKI, dan perdagangan manusia) juga menghasilkan berita yang cukup kontroversial. Misalnya, pihak pemerintah Malaysia yang terkesan selalu 'menekan' dan memaksakan kepentingannya kepada pemerintah Indonesia.

Dalam soal Ambalat, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda menegaskan bahwa 'kita bilang tidak'. Kita berkepentingan untuk memaksimalkan upaya kita dalam menyelesaikan masalah garis batas akhir terlebih dahulu dan jangan bicara kerja sama. Itu adalah posisi Indonesia.² Hingga kini (April 2006), masalah penentuan garis batas di perairan Ambalat belum juga selesai karena masih banyak perbedaan pendapat dan hal-hal yang disengketakan. Kendatipun tim perunding dari Indonesia dan Malaysia secara rutin bertemu satu bulan sekali, namun Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi mengakui bahwa

¹ "Indonesia Tolak Tawaran Malaysia, Perbatasan di Ambalat Harus Lebih Dulu Diperjelas," *Kompas Online*, 14 Januari 2006, Jakarta, Indonesia, hal. 9.

² *Ibid.*

masalah blok Ambalat bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan.³ Hingga kini, kedua negara belum memperoleh solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Itulah sebabnya Indonesia tidak bisa melakukan suatu kerja sama di area yang masih dipersengketakan. Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda kembali menegaskan bahwa kerja sama antara Petronas dan Pertamina dapat saja dilakukan di tempat lain tetapi bukan di Ambalat.⁴

Di luar soal Ambalat, dihasilkan pula beberapa kesepakatan, antara lain (1) kedua negara, Indonesia-Malaysia bertekad memberantas perdagangan manusia dan menginstruksikan kepolisian kedua negara meningkatkan kerja sama untuk mendukung maksud tersebut;⁵ (2) dalam hal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia bertekad memperbaiki perlindungan terhadap TKI. Untuk itu perlu segera ditandatangani nota kesepahaman tentang penempatan TKI oleh kedua belah pihak secepatnya;⁶ (3) Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi juga menyampaikan dukungannya atas keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengirim guru-guru Indonesia ke perkebunan di pedalaman Malaysia untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak TKI, sesuai dengan aturan dan hukum Malaysia;⁷ dan (4) mengenai *illegal logging*, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mendorong percepatan pembahasan nota kesepahaman bidang kehutanan yang ditujukan untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangannya.⁸

³ Kompas Online, 14 Januari 2006, *op. cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ "RI-Malaysia, Berantas Perdagangan Manusia," *Kompas Online*, 16 Januari 2006, Jakarta, Indonesia, hal. 9.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia

Masalah-masalah yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini (2000-2005), menyangkut isu-isu sekitar perbatasan/Ambalat, *illegal logging*, dan soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dapat disimpulkan sebagai suatu gejala baru bagi kedua negara, setelah rujuknya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia selama sekitar 40 tahun terakhir (1966-2006). Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia termasuk pemutusan hubungan yang bersifat bilateral antara kedua negara (1963 sampai dengan 11 Agustus 1966), dapat dikatakan tidak ada kaitannya dengan isu perbatasan, *illegal logging* dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.

Dari sisi sejarah memang Indonesia-Malaysia tidak luput dari proses hubungan yang mengalami gelombang 'naik-turun'. M. Rodzi Abd Razak melihat konfrontasi Indonesia-Malaysia sebagai suatu hal yang kontroversial dan jelas merupakan sejarah kelabu bagi hubungan kedua negara, seolah-olah muncul begitu saja dan 'tidak cukup alasan' sehingga dapat dikatakan konfrontasi sebagai hal yang 'tidak rasional'.⁹ Berbagai upaya untuk mengakhiri konfrontasi selalu menemui jalan buntu, baru setelah peristiwa Gerakan 30 September (GESTAPU), dan sejak 1 Oktober 1965 menjadi titik penting bagi mengendurnya ketegangan hubungan kedua negara.¹⁰ M. Rodzi menekankan bahwa soal konfrontasi lebih disebabkan oleh ambisi dan kepentingan Sukarno daripada pihak-pihak di Malaysia. Hal itu ditekankan oleh M. Rodzi kalau Sukarno menganggap Malaysia sebagai alat neo-kolonialisme dan gagasan Malaysia adalah proyek kolonial yang merupakan kelanjutan kolonialisme British di Asia Tenggara.¹¹ Sukarno sendiri juga

⁹ M. Rodzi Abd Razak, *Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1966: Isu dan Kontrovesi*, dalam Maizatul Haizan Mahbob Mohamad Zain Bin Musa, *Tinjauan Baru Politik Malaysia*, Penerbit University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia, 2005, hal. 162-164.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pernah menyatakan *'We did not agree with the formation of Malaysia, because we are convinced that Malaysia is neo-colonialism.'*¹² Besarnya peran Sukarno sebagai alat penyambung lidah rakyat (sebutan populer pada periode pertengahan 60-an), memang terkait dengan pengalihan perhatian dari isu-isu domestik (sulitnya keadaan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia umumnya) dengan menciptakan 'musuh baru' yaitu 'Ganyang Malaysia'.

Ketidak-rasionalan Sukarno khususnya tampak bahwa bagaimana mungkin Indonesia yang menghadapi berbagai masalah ekonomi yang demikian kronis (besarnya utang luar negeri, rendahnya pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, dan sulitnya diperoleh berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras misalnya) meminta TNI/Angkatan Darat (AD) dan rakyat untuk menyerbu/perang melawan Malaysia. Harus diakui, memang ada keinginan utama Sukarno pada waktu itu (mendekati pertengahan 60-an) untuk mengalihkan perhatian pimpinan TNI/AD yang dianggap telah mengancam kekuatan Sukarno yang merangkul 'partnernya' (para pimpinan PKI). Singkatnya, pengalaman konfrontasi telah memberi pelajaran bagi banyak pihak di Malaysia, bahwasanya tanpa toleransi dan kerja sama, isu-isu yang sepatutnya bisa diselesaikan lewat meja perundingan akhirnya berlanjut ke medan konflik yang lebih besar dan bahkan Sukarno telah dianggap menjadi mangsa konspirasi yang dilakukan pihak Barat selepas Perang Dunia II.¹³

Kendatipun banyak pihak di Malaysia yang menyalahkan Sukarno sebagai 'otak utama' pencetus konfrontasi maupun pihak yang sulit dimintai toleransinya, namun banyak pihak pula yang bersimpati terhadap pribadi maupun pemikiran Sukarno sebagai seorang pemimpin Indonesia yang amat karismatik. Karena itu, situasi yang menunjukkan adanya kekesalan dapat pula diikuti secara bersamaan oleh sikap-sikap simpati dari pihak-pihak di

¹² *Ibid.*

¹³ M. Rodzi Abd Razak, *loc. cit.*, hal. 183.

Malaysia terhadap Sukarno. Hal ini bisa terjadi, tidak lain seperti apa yang dikatakan oleh Nor Azizan Idris bahwa 'faktor persaudaraan dan serumpun' merupakan hal yang amat menonjol dalam membicarakan hubungan Indonesia-Malaysia.¹⁴ Akibatnya, konflik yang pernah terjadi tidak melahirkan sikap dendam yang berlarut-larut. Tampak kedua belah pihak tetap mengutamakan asas persaudaraan untuk mengakhiri konflik yang pernah terjadi selama 3 tahunan tersebut (1963-1966). Hal ini pun diakui oleh seorang *eminent person* Indonesia di ASEAN, bahwa rasanya kita dengan Malaysia seperti 'saudara kandung', jadi kalau terus menerus bermusuhan/bertengkar, ada perasaan bersalah maupun perasaan berdosa yang amat mendalam.¹⁵

Faktor kedua yang juga penting untuk diulas dalam melihat adanya unsur penunjang (kedekatan hubungan Indonesia-Malaysia), terutama disebabkan adanya paham nasionalisme di kedua negara. Kedua belah pihak menyadari bahwa mereka mayoritas adalah serumpun yang mempunyai persamaan dari segi budaya, bahasa, dan agama. Identifikasi simbolik ini selalu digunakan oleh kebanyakan pemimpin di kedua negara apabila mereka mempunyai masalah dalam hubungannya dengan Singapura.¹⁶ Bahkan orang Melayu pun kalau mereka merasa terancam (oleh Singapura), mereka pun rela hidup dalam keadaan miskin dan bergabung dengan Indonesia. Indonesia memang akan merasa lebih dekat dengan Malaysia daripada Singapura. Apalagi seandainya Malaysia membutuhkan pertolongan Indonesia dalam berhadapan dengan Singapura, maka saya yakin Indonesia akan lebih berpihak dan mendukung Malaysia.¹⁷

¹⁴ Nor Azizan Idris, "Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Asing Tanpa Izin" dalam Sity Daud, Zarina Othman, *Politik dan Keselamatan*, UKM, Bangi, Malaysia, 2005, hal. 148.

¹⁵ Wawancara Mendalam dengan Dr. CPF. Luhulima, 3 November 2005, Jakarta, Indonesia.

¹⁶ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 149.

Ketiga adalah faktor geografi. Keberadaan semenanjung Melayu yang berhampiran dengan kepulauan Indonesia (Sumatera dan Jawa) menyebabkan penduduk di semenanjung lebih terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat di kepulauan Indonesia daripada dengan masyarakat di wilayah Asia tenggara lainnya. Faktor ini menurut Nor Azizan Idris memainkan peranan penting dalam mempererat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia.¹⁸ Akhirnya banyak pihak, terutama mereka yang berasal dari kaum Melayu menganggap bahwa Indonesia adalah negara besar dari sisi luasnya wilayah (5.000 km dari Sabang sampai Merauke) dan jumlah penduduknya (237 juta). Hal tersebut masih ditambah lagi oleh pengalaman perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah Belanda dan berhasil merebut kemerdekaannya sendiri dari tangan Jepang.¹⁹ Semua hal tersebut telah membuat mereka di Indonesia merasa lebih unggul dari segi budaya dan politik dibanding dengan orang Melayu di Malaysia. Di samping itu, pihak pejabat pemerintah di Indonesia umumnya berpandangan bahwa hubungan Indonesia-Malaysia tidak saja seperti abang dan adik, tetapi lebih dari itu 'adik yang baik' tidak boleh melawan pada 'abangnya'.²⁰

Memasuki era 1990-an, banyak terjadi perubahan baik di tingkat global, regional, maupun di masing-masing negara (Malaysia dan Indonesia). Malaysia pun mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang (politik, ekonomi, bisnis, industri, dan lain-lain). Bahkan kemajuannya tersebut menuntut peran lebih aktif lagi di tingkat regional, misalnya tampil menjadi sekretariat ASEAN +3 (ditambah Cina, Jepang, dan Korea Selatan). Hal ini oleh Jamie Hj. seolah-olah diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyaingi Indonesia.²¹ Tidak ada pernyataan resmi dari pihak Indonesia

¹⁷ Dr. CPF. Luhulima, *loc. cit.*

¹⁸ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 149.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ CPF Luhulima, *loc. cit.*

sendiri menyangkut soal interpretasi tersebut. Tampaknya hal itu hanya merupakan perkiraan pihak pengamat tertentu saja yang masih tetap paranoid dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Indonesia yang sering disebut sebagai *'the ASEAN Tiger'*.

Mendekati pertengahan 1990-an, perubahan substansial di bidang ekonomi, akibat dampak globalisasi memang terjadi drastis di lingkungan Asia Tenggara. Malaysia maupun beberapa negara lainnya seperti Singapura dan Thailand mengalami kemajuan pesat yang tidak tertandingi oleh Indonesia khususnya di bidang industri manufaktur, kegiatan bisnis, dan finansial serta teknologi komunikasi modern. Perkembangan ini juga membawa arti penting terhadap budaya politik masyarakat Melayu di Malaysia. Telah terjadi perubahan yang cukup penting, yaitu dari budaya politik yang bersifat *'tertakluk-sempit'* (sejak zaman feodal, penjajahan, dan kemerdekaan) menjadi *'kritikal-konservatif'* (impak dari pengalaman modernisasi 1980-1990-an).²²

Selanjutnya, perkembangan terkini (2005-2006) menunjukkan pada kita kalau budaya politik orang Melayu sekali lagi sedang dilanda arus perubahan hasil daripada perkembangan ide-ide sipil.²³ Terjadinya perubahan budaya politik tersebut tampaknya selama ini luput dari perhatian maupun perkiraan pihak-pihak pejabat pemerintah di Indonesia. Mereka umumnya selalu dan masih berpikir bahwa Malaysia masih dominan menganut 4 faktor yang dikemukakan Nor Azizan Idris, kalau superioritas Indonesia sebagai *'abang'* dari *'adiknya'* (Malaysia) tetap berlaku. Banyak pihak pula di Indonesia yang tidak begitu gembira maupun belum bisa menerima kalau melihat hubungan pengaruh antar kedua negara tersebut menjadi terbalik, artinya Indonesia tidak begitu saja bisa menobatkan dirinya lagi atau dianggap sebagai *'abang'*.²⁴

²¹ Jamie Hj et al, *'Budaya Politik Melayu Kesenambungan dan Perubahan, dalam Sity Daud, Zarina Othman, Politik dan Keselamatan, UKM, Bangi, Malaysia, 2005, hal. 97*

²² Jamie Hj. and Others, *loc. cit.*, hal. 97.

²³ *Ibid.*

Perkembangan dari Malaysia yang mengalami berbagai kemajuan ekonomi dan finansial, tentunya negara tersebut ingin dilihat sebagai negara yang kedudukannya sejajar dengan negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia.

Sejak akhir 1997, dengan terjadinya krisis Asia, kondisi keuangan dan ekonomi Indonesia makin terpuruk. Hal ini berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dua hal jelas yang langsung dirasakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia; pertama, merosotnya peran pemerintah dalam ikut langsung menjadi 'leader' di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan kepada rakyatnya; dan kedua, makin banyak orang Indonesia yang masuk dalam kriteria penduduk miskin (1997-1999, sekitar 70 juta orang) dan pengangguran (1997-1999, sekitar 40 juta orang). Ini merupakan hal negatif yang dahsyat dampaknya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu dampak penting adalah munculnya masalah peningkatan pendatang tanpa izin (Pati) dari Indonesia ke Malaysia sejak awal 1998 sampai dengan 2002. Sebenarnya, soal pendatang Indonesia yang masuk dan bekerja di Malaysia sudah terjadi sejak 1970-an, bisa dikatakan hal itu disebabkan kedekatan geografis antara daerah semenanjung Malaya dengan Pulau Sumatera. Ditambah lagi, pihak penguasa di Malaysia pada waktu itu tidak melakukan 'kontrol' yang ketat.²⁵ Juga ada semacam dampak politis dari pihak Melayu di Malaysia, bahwa adanya kesamaan dalam hal ras melayu, bahasa, dan agama, itu semua tentunya akan membantu dan memperkuat kedudukan ras melayu di Malaysia dalam berhadapan dengan ras lainnya.²⁶

Pada April 1998, soal pendatang dari Indonesia menjadi masalah besar bagi Malaysia maupun Indonesia sendiri karena disamping terdapat 1.221.564 pekerja yang sah (menurut undang-undang dan peraturan) yang masuk ke Malaysia, terdapat pula Pati

²⁴ CPF Luhulima, *loc. cit.*

²⁵ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 150.

²⁶ *Ibid.*, hal. 152.

(Pendatang tanpa izin) Indonesia yang berjumlah 600.000 orang. Selain itu, terdapat pula jumlah mereka yang tinggal melebihi tempo dari waktu yang ditetapkan berjumlah 700.000 orang. Dari jumlah tersebut, mereka yang berasal dari Indonesia sejumlah 296.026 orang, diikuti oleh mereka dari negara-negara lainnya dengan jumlah yang berbeda satu sama lain (Bangladesh, India, Myanmar, Filipina, Pakistan, China dan Nepal).²⁷ Secara statistik (2004), persentase jumlah tenaga kerja asing dari Indonesia terus mengalami peningkatan dan dominan pada 1998 (52.3%), 1999 (65.7%), 2000 (69.4%), 2001 (68.4%), 2002 (64.7%), 2003 (63.8%), dan 2004 (66.5%).²⁸ Kasus-kasus tertentu dari Pati Indonesia yang menimbulkan masalah seperti hukuman penjara dan pemulangan paksa oleh pihak penguasa Malaysia memang telah menimbulkan reaksi yang keras dari pihak-pihak di Indonesia dan berdampak pada kesan yang kurang baik bagi hubungan kedua negara.

Ada empat hal utama yang menyebabkan gelombang kehadiran Pati Indonesia yang besar jumlahnya tersebut sejak 1998 menimbulkan masalah; pertama, soal bayarannya lebih murah terhadap pekerja Indonesia dibanding para pekerja lokal; kedua, meningkatnya pengangguran para pekerja di perkebunan, akibat murahnya bayaran tenaga kerja asing, sehingga mereka lebih mendapat prioritas dibandingkan dengan pekerja lokal di Malaysia sendiri; ketiga, kebanyakan pekerja Indonesia yang berjumlah 2 juta orang (2004) membawa dan mengirim uang hasil pendapatannya kepada keluarganya di Indonesia, situasi ini jelas tidak menguntungkan perekonomian Malaysia dan bertambahnya devisa yang dinikmati rakyat Indonesia (data 1996, hampir 2 billion Ringgit Malaysia 'terbang' ke Indonesia).²⁹ Akhirnya, masalah-masalah yang terkait dengan keamanan dan kejahatan (penjambretan, pencurian, kurangnya integrasi dengan penduduk

²⁷ *Ibid.*, hal. 147.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 147

setempat, dan lain-lain) yang dirasakan meningkat oleh pihak-pihak di Malaysia dan banyak dilakukan oleh para pendatang dari Indonesia.³⁰

Salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah Indonesia, misalnya polisi di Selangor membongkar sebuah penampungan tenaga kerja ilegal yang didiami oleh lebih daripada 500 orang asing kebanyakan warga Indonesia di Dengkil, Selangor pada 27 April 2002.³¹ Pemerintah Malaysia sendiri pernah juga 'kesal' dengan terjadinya kerusuhan di tempat tahanan imigrasi Machap Umboo, Melaka (Februari 2001), dan kerusuhan di pusat tahanan sementara di Pekan Nenas, Pontian, Johor (26 Januari 2005 hingga 1 Februari 2005). Pihak Malaysia khawatir kalau kerusuhan tersebut akan berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.³² Peristiwa tersebut telah menimbulkan reaksi dari Perdana Menteri Dr. Mahathir yang berkeinginan mengkaji ulang pengambilan pekerja dari Indonesia berikut masalah yang ditimbulkannya. Singkatnya, Mahathir mengatakan 'yah lebih baik balik ke negara sendirilah (Indonesia) daripada menimbulkan kekacauan di sini'.³³

Perundingan untuk menyelesaikan soal Pati Indonesia dengan berbagai masalah tampaknya gagal dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Kelemahan lebih banyak tampak pada pihak Indonesia karena pertama, pekerja kita yang banyak menggantungkan nasib kehidupannya di Malaysia; kedua, Indonesia pun sebenarnya secara teknis belum siap dari segi prasarana dan

³⁰ Wawancara Mendalam dengan Ibu H. Alwi, 20 Januari 2006, di Jakarta, Indonesia. "Ia malu karena sering mendengar kalau banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang Indonesia di Malaysia, dan hal itu merupakan pengakuan tulus darinya".

³¹ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 151.

³² *Ibid.*, hal. 153.

³³ *Ibid.*

keuangan untuk menangani kepulauan Pati dalam waktu singkat.³⁴ Tampak sekali adanya keinginan dari pihak Indonesia yang minta agar Pati diberi pengampunan atau pemutihan izin tinggal. Ini tidak lain bahwa bagaimanapun sumbangan Pati terhadap ekonomi Indonesia amat penting, sehingga pemerintahan Presiden Megawati pada waktu itu (2002) minta kebijakan pengampunan dan pemutihan agar dipertimbangkan oleh pemerintah Malaysia.³⁵

Ketiga, dari kasus Pati tersebut, terlihat tidak adanya kesatuan pendapat para pejabat di kabinet Megawati, misalnya mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Jacob Nuwa Wea yang menuduh Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dan juga Duta Besar Indonesia di Malaysia sebagai pihak-pihak yang gagal menjaga kepentingan pekerja Indonesia di Malaysia.³⁶ Akibatnya, MoU menyangkut pemulangan Pati Indonesia yang seharusnya ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Malaysia menjadi batal.

Reaksi lainnya yang menyangkut pemulangan Pati Indonesia juga bervariasi, misalnya saja Hamzah Haz turut menyatakan kekesalannya, yaitu kenapa bangsanya kini bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga budaya, sosial, undang-undang dan politik. Hamzah Haz lebih jauh mengatakan 'Mereka bagai kapal yang hampir tenggelam dan bertambah malang, kemiskinan itu turut diekspor ke Malaysia, sehingga akhirnya membawa kesusahan kepada diri mereka sendiri'.³⁷

Situasi Indonesia yang masih belum pulih dari berbagai krisis (2002), ditambah beberapa faktor pencitraan diri yang bersifat 'superioritas' Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Nor Azizan Idris, semua ini jelas menjadi pendorong utama atas sikap-sikap

³⁴ *Ibid.*, hal. 156.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 156.

³⁷ *Ibid.*, hal. 160.

sebagian besar pejabat pemerintah maupun para Pati Indonesia yang selalu ingin memberontak, cepat marah walaupun pada awalnya hanya dimulai oleh sedikit perselisihan maupun kesalahpahaman. Hal ini juga terlihat dari maraknya aksi demonstrasi jalanan di Jakarta (Januari 2002) yang memprotes soal perlakuan pihak Malaysia terhadap Pati Indonesia.³⁸

Begitu pula sikap kemarahan juga diungkapkan langsung oleh Amien Rais (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002), 'Amien merasa kecewa, marah dan tidak dapat menerima bahwa Malaysia melakukan hukuman fisik terhadap Pati Indonesia yang dianggap tidak berperikemanusiaan dan menyakitkan rakyat Indonesia'.³⁹ Pernyataan Amien Rais tersebut berdampak lebih jauh, yaitu munculnya demonstrasi yang dilakukan oleh Laskar Merah Putih di depan Kedubes Malaysia di Jakarta, yang intinya akan mengulang lembaran sejarah 'Ganyang Malaysia' yang pernah digerakkan oleh Sukarno pada 1963.⁴⁰ Akhirnya pernyataan Amien Rais tersebut dibantah oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Amien tersebut bukanlah keterangan resmi dari pemerintah RI, hal itu hanya merupakan pendapat pribadi.⁴¹

Dari kasus Pati dan perbedaan pendapat antar elite pemerintah Indonesia, terutama mulai dari reaksi yang keras sampai dengan moderat, tampaknya memang tidak dapat dihindarkan. Ini merupakan konsekuensi masing-masing pihak melihat Malaysia dari sisi kepentingannya masing-masing, terutama terkait dengan ruang lingkup pekerjaan dan latar belakangnya. Situasi ini tambah memprihatinkan, dengan munculnya kasus Ambalat di awal 2005. Hubungan Indonesia-Malaysia yang diwarnai berbagai kasus

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 161.

⁴¹ Nor Azizan Idris, *loc. cit.*, hal. 161.

(*illegal logging* dan TKI) dengan 'luka' yang cukup dalam. kemudian diperparah lagi dengan munculnya kasus sengketa Ambalat (Januari-April 2005). Akibatnya, makin dalam 'luka' yang mewarnai hubungan Indonesia-Malaysia. Luka tersebut tidak saja makin parah tapi juga makin membuat banyak pihak yang terlibat demonstrasi di Jakarta dan di berbagai daerah menyatakan bahwa dalam soal Ambalat, Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun. Umumnya, para demonstran tersebut kembali mengingatkan publik Indonesia, awas jangan sampai 'kita ditipu 2 kali' terutama setelah kasus Sipadan dan Ligitan. Kasus Ambalat bisa dikatakan menjadi kulminasi kemarahan berbagai pihak dari Indonesia. Tampaknya tidak ada lagi pertimbangan yang rasional, yang ada hanya satu jawaban bahwa pihak-pihak di Indonesia amat yakin bahwa Ambalat adalah milik Indonesia.

Krisis Kepemimpinan?

Situasi tersebut makin keruh karena di pihak Indonesia sendiri tampaknya tidak ada satu pun instansi yang bisa diandalkan menjadi pusat informasi maupun pihak yang dapat menjernihkan soal Ambalat. Ini makin diperparah lagi dengan hilangnya faktor 'pemimpin yang karismatik' di Indonesia. Dapat dikatakan, setelah era Sukarno dan Suharto, Indonesia mengalami krisis kepemimpinan. Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi (1997-1999), tidak ada seorang presiden yang punya kekuasaan yang demikian kuat. Indonesia di era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Sukarnoputri, masuk dalam kekuasaan eksekutif yang demikian lemah. Ini jelas berdampak terhadap berbagai masalah yang muncul dalam hubungan Indonesia-Malaysia.

Perbedaan pendapat soal TKI yang terjadi antar anggota kabinet di era Megawati misalnya (antara Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea dengan Menlu Hassan Wirayuda) dan lain-lain adalah bukti dari tidak adanya *leadership* yang kuat dalam soal TKI tersebut. Tampaknya masing-masing pihak lebih sibuk menghadapi soal-soal politik dan ekonomi domestik yang sangat banyak menyita perhatian mereka. Tampaknya, berbagai masalah bergulir sendiri,

tanpa ada pihak yang bisa ditempatkan sebagai 'komandan utama' agar ada prioritas dan fokus yang jelas dalam menangani berbagai masalah. Akibatnya, hubungan Indonesia-Malaysia tampaknya menjadi terombang-ambing dan tidak tentu arahnya.

Akhir Oktober 2004, yang merupakan awal dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, tidaklah berarti dapat segera mengatasi problema krisis kepemimpinan di Indonesia. Dalam hal SBY yang dipilih langsung oleh rakyat, memang hal tersebut merupakan kelebihan tersendiri bagi SBY dibanding 3 presiden lainnya (Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Sukarnoputri). Jalan yang ditempuh SBY jelas lebih terpercaya, namun bukan berarti dalam waktu singkat SBY bisa lebih fokus dan lebih baik dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi Indonesia dalam hubungannya dengan Malaysia. Maraknya demonstrasi anti Malaysia di awal tahun 2005 dalam soal Ambalat dan TKI muncul begitu saja secara sporadis di berbagai tempat di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan SBY membiarkan saja demo-demo rakyat tersebut terjadi. Hal ini secara tidak langsung merupakan keuntungan bagi pemerintahan SBY, untuk sementara SBY dan JK (awal 2005) terhindar dari kritik-kritik yang tajam menyangkut kredibilitas susunan anggota kabinetnya (antara lain kasus Menteri Hamid Awaluddin dan korupsi berjamaah di Komisi Pemilihan Umum). SBY juga belum dapat berbuat banyak mengenai bagaimana menempatkan persoalan Ambalat secara berani dan proporsional membela kepentingan nasional Indonesia. Bahkan terkadang terlihat SBY dan pemerintahannya 'terlibat dengan emosi rakyat', bahkan ingin memanfaatkan soal Ambalat dan TKI bagi 'konsumsi politik domestik'.

Krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia, amat besar pengaruhnya terhadap 'stabilitas' hubungan Indonesia-Malaysia. Masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua negara tampaknya menjadi cukup dilematis. Kita (Indonesia) punya presiden yang baru (SBY) tapi masalah-masalah kronis yang bersifat domestik (KKN) masih hidup subur. Kita bukan saja harus 'tahu diri' tapi

tidak bisa berbuat banyak menghadapi KKN. Soal KKN inilah yang tidak saja membuat Malaysia lebih baik posisinya dalam menghadapi Indonesia dalam kasus *illegal logging* dan TKI tetapi juga membuat pencitraan Indonesia tidak saja terpuruk di tingkat regional tapi juga secara global. Situasi tersebut diperparah lagi oleh KKN yang dilakukan oleh mereka para pejabat yang bekerja di KBRI.⁴² Dalam soal TKI, pemerintah Indonesia bukannya membantu mengurus dengan baik masalah-masalah yang dihadapi warganya yang meminta fasilitas keimigrasian tetapi justru meminta pungutan uang yang amat berlebihan. Terbongkarnya penyelewengan di Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia sebesar Rp. 13,8 milyar dan KBRI di Kuala Lumpur sebesar Rp. 27,8 milyar.⁴³ Dalam kasus TKI, bagaimana pihak Indonesia bisa terlihat kredibel di mata pihak Malaysia?

Berbeda dengan soal TKI, kasus Ambalat membuat kita lebih runyam lagi. Hal ini terutama terkait dengan masuknya kapal perang Malaysia di Laut Sulawesi dan pemerintah Malaysia mengklaim daerah laut Ambalat yang kaya minyak dan gas sebagai wilayahnya. Hal tersebut diikuti insiden, kapal nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di daerah Ambalat tersebut diganggu (awal Maret 2005). Malaysia bukan saja melanggar batas negara Indonesia tetapi juga sudah melakukan provokasi. Menurut tajuk rencana Harian Kompas, Malaysia sudah bersikap keterlaluan yaitu 'bagaimana mungkin kita sudah dilecehkan'.⁴⁴ Selagi persoalan TKI belum usai, kasus insiden Ambalat tiba-tiba muncul begitu saja. Kritik atas insiden Ambalat tersebut juga ditayangkan Kompas pada pemerintah, 'bahwa Indonesia dengan berbagai krisis dan kelemahannya dianggap sebagai *soft state* dan *soft nation* yang

⁴² Wahyu Susilo, "Soal Warga Indonesia Tanpa Paspor di Malaysia", *Kompas Online*, 12 Januari 2006, Jakarta, Indonesia.

⁴³ *Kompas Online*, 12 Januari 2006, Jakarta, Indonesia.

⁴⁴ *Kompas Online*, 8 Maret 2005, Jakarta, Indonesia.

tidak berdaya menghadapi ulah dan tekanan negara tetangganya (Malaysia)'.⁴⁵

Dalam hal Ambalat, beberapa pihak tetap berkeyakinan bahwa Indonesia dapat menolak klaim Malaysia atas wilayah laut Ambalat tersebut. Klaim Malaysia atas Ambalat dilakukan karena alasan pemilikan Sipadan dan Ligitan, serta peta 1979 (yang dibuat oleh Malaysia), sehingga Malaysia berani memberikan hak eksplorasi di kawasan tersebut kepada perusahaan minyak Inggris-Belanda, British Petroleum dan SHELL.⁴⁶ Konteks itulah yang menyebabkan pihak Indonesia bersikap tegas, tidak mau begitu saja mengikuti klaim Malaysia. Sayangnya, berbagai perundingan yang dilakukan dalam kasus Ambalat belum membuahkan hasil karena tampaknya Malaysia enggan untuk menyelesaikan soal perbatasan tersebut.⁴⁷

Dalam kasus Ambalat, menurut Dr. Hasyim Djalal, ada 3 hal yang harus dilakukan Indonesia. Pertama, blok Ambalat dan Ambalat Timur bukan kelanjutan alamiah dari daratan Sabah-Malaysia sebab antara kedua blok tersebut (Ambalat), terdapat laut dalam yang tidak mungkin bisa dikatakan bahwa 2 blok Ambalat adalah kelanjutan alamiah Sabah.⁴⁸ Lebih jauh menurut Djalal, Sipadan dan Ligitan juga terpisah oleh laut yang dalam dengan Sabah, namun pada kasus Sipadan dan Ligitan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia karena secara *de facto*, Malaysia lebih dulu mengelola kedua pulau tersebut.⁴⁹ Kedua, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, diakui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nations Convention Law of*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Kompas Online*, 8 Maret 2005, *loc. cit.*

⁴⁸ *Kompas Online*, 9 Maret 2005, Jakarta, Indonesia.

⁴⁹ *Ibid.*

the Sea/UNCLOS 1982).⁵⁰ Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dibolehkan menarik *baseline* dari ujung pulau-pulau terluar. Ketiga, ditambahkan lagi oleh Dr. Hasyim Djalal, argumentasi Malaysia lainnya yang perlu dipatahkan adalah soal 'peta 1979' yang bias dan sepihak sifat pengakuannya. Peta yang dibuat Malaysia secara unilateral itu hingga kini masih dijadikan dasar klaim sepihak.⁵¹ Bagaimanapun juga, keberhasilan Indonesia juga ditentukan oleh adanya tim kerja yang solid, didukung orang-orang yang ahli dalam membuktikan bahwa adanya laut yang dalam yang memisahkan antara Ambalat dan blok Ambalat Timur dengan Sabah adalah faktor yang amat penting, sehingga wilayah tersebut jelas bukan otomatis kelanjutan dari Sabah.

Isu masalah perbatasan lainnya yang cukup krusial, yaitu panjangnya perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang mencapai 2.004 km, namun hanya ada 30 pos perbatasan. Situasi tersebut amat tidak mendukung untuk melakukan pengawasan intensif terhadap berbagai masalah yang muncul di sekitar perbatasan. Salah satu masalah yang sudah terjadi dan cukup merugikan Indonesia, yaitu bergesernya patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat ke wilayah Indonesia sekitar 600 meter.⁵² Akibatnya, wilayah yang semula masuk Indonesia kini masuk wilayah Kampung Gumbang, Serikin, Sarawak, Malaysia.⁵³ Untuk membangun dan memperbaiki kembali patok-patok perbatasan dan berbagai fasilitas yang memadai antara Indonesia-Malaysia, diperlukan biaya sekitar 2 triliun rupiah. Jelas hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat buat Indonesia dalam mengatasi pelintas batas ilegal dan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Kompas Online*, 17 Maret 2005, Jakarta, Indonesia.

⁵³ *Kompas Online*, 17 Maret 2005, *loc. cit.*

dimanfaatkannya wilayah perbatasan bagi kepentingan kegiatan terorisme oleh pihak-pihak ketiga.

Isu lainnya yang cukup sensitif dan turut mewarnai hubungan Indonesia-Malaysia pada 2005 yang lalu adalah meningkatnya intensitas masuknya *illegal logging* dari Riau (Sumatera) ke Malaysia. Penyelundupan kayu dari Riau ke Malaysia pada 2004 sekitar 5.000-7.000 m³ dan pada 2005 menjadi 9.000 m³ per 2 minggu.⁵⁴ Mengapa *illegal logging* marak terjadi di Riau? Ini disebabkan akses langsung ke pelabuhan liar di Malaysia mudah dicapai dari Riau melalui aliran-aliran sungainya. Seperti Sungai Siak Kecil yang bermuara di Selat Bengkalis. Dari selat itu, perjalanan melintasi laut menuju Malaysia hanya butuh waktu sekitar empat jam.⁵⁵

Illegal logging di Indonesia berjalan subur karena adanya kerja sama antar oknum yang terkait dengan pengamanan hutan dan perdagangan lintas daerah maupun negara. Hal itu terjadi dan dimulai dari Departemen Kehutanan, Bea dan Cukai, Imigrasi, Kepolisian, TNI AL, TNI AD, serta Kejaksaan. Menteri Kehutanan M.S. Kaban menyadari akan kebobrokan yang sudah kronis tersebut dan sudah seperti lingkaran setan yang sulit diberantas.⁵⁶ Oleh sebab itu, Indonesia menghimbau kepada pihak-pihak di Malaysia maupun Singapura, agar juga konsisten mencegah *illegal logging* yang tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan di Indonesia tetapi pada kedua negara tetangga tersebut. Singkatnya, keuntungan material yang diperoleh Malaysia dan Singapura dengan murahnya harga kayu dari *illegal logging* tersebut tidak akan punya arti besar karena pada akhirnya, 'semua negara' harus membayar mahal dengan rusaknya tata lingkungan baik di Indonesia, maupun di Malaysia, dan Singapura.

⁵⁴ *Kompas Online*, 2 Januari 2006, Jakarta, Indonesia.

⁵⁵ *Kompas Online*, 16 Januari 2006, Jakarta, Indonesia.

⁵⁶ *Kompas Online*, 16 Januari 2006, *loc. cit.*

Kesimpulan

Tiga isu utama (soal perbatasan/Ambalat, *illegal logging*, dan tenaga kerja Indonesia) telah menjadi isu dan tantangan serius bagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di tahun 2005 dan tampaknya tetap akan menjadi isu-isu yang dominan di masa mendatang. Kendatipun banyak pendapat dari pihak Indonesia yang menganggap Malaysia sebagai pihak yang melakukan provokasi dan melecehkan Indonesia dalam responnya yang terkait dengan isu-isu perbatasan, *illegal logging*, dan tenaga kerja, namun respon Malaysia tentunya tidak dapat ditanggapi secara emosional. Secara umum, ini terjadi karena 2 hal; pertama, persepsi dan pencitraan dari banyak pihak di Indonesia yang masih tidak berubah dan sesuai dengan gambaran dari Nor Azizan Idris yakni hubungan Indonesia-Malaysia yang bersifat kekeluargaan, satu rumpun budaya, bahasa, agama, dan bahkan Indonesia sering dilihat sebagai 'saudara tua'. Akibatnya banyak pihak di Indonesia, dalam menghadapi masalah di sekitar isu-isu perbatasan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan sikap dari pihak-pihak di Malaysia yang membiarkan terjadinya *illegal logging* mengharapkan adanya toleransi dan sikap yang tidak saja membantu tetapi membela kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia umumnya. Singkatnya, 'kasihanilah kami, karena kehidupan ekonomi kami sedang sulit dan didera krisis serta soal KKN yang tiada habisnya'.

Kedua, benar dengan apa yang menjadi kesimpulan Dr. Ikrar Nusa Bhakti, kini Malaysia bukan lagi 'anak bawang', namun Malaysia sudah memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang tangguh.⁵⁷ Jadi pihak-pihak di Indonesia harus mengubah sikap dan pendekatannya dalam menghadapi Malaysia. Intinya, kita tidak hanya 'tahu diri' saja tetapi lebih dari itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dalam segala hal (baik secara teknis maupun

⁵⁷ Dr. Ikrar Nusa Bhakti, "Konfrontasi Jilid Dua", *Kompas Online*, 9 Maret 2005, Jakarta, Indonesia. Juga Lihat, *Kompas Online*, 23 January 2006, Jakarta, Indonesia. 'Jumlah penduduk Malaysia 25,6 juta and GNP of 4.656 US\$ telah menunjukkan kekuatan ekonominya yang 5 sampai 6 kali lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia'.